

DAFTAR ISI**LEMBAR PENGESAHAN****LEMBAR PERNYATAAN****ABSTRAK i****KATA PENGANTAR..... iii****DAFTAR ISI..... ix****BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	16
1. Kegunaan Teoritis	16
2. Kegunaan Praktis	16
E. Kerangka Pemikiran.....	17
F. Metode Penelitian	24
1. Spesifikasi Penelitian	24
2. Metode Pendekatan	26
3. Tahap Penelitian	27
4. Teknik Pengumpulan Data	28
5. Alat Pengumpul Data	30
6. Analisis Data	31
7. Lokasi Penelitian	32

BAB II KAJIAN TEORI TINDAK PIDANA, DELIK PUNGUTAN LIAR (PUNGLI), DELIK SUAP, DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana	33
2. Unsur-Unsur Tidak Pidana	38

B. Ruang Lingkup Tidak Pidana Pungutan Liar (Pungli) dan Tindak Pidana Suap.....	40
1. Istilah dan Pengertian Delik	40
2. Pungutan Liar (Pungli) Pada Umumnya	45
3. Tindak Pidana Suap Pada Umumnya	52
C. Pengertian, Jenis dan Asas-Asas dalam Pelayanan Publik	64
1. Pengertian Pelayanan Publik	64
2. Jenis-Jenisa Pelayanan Publik	67
3. Maksud, Tujuan dan Asas Pelayanan Publik	69

BAB III PERBANDINGAN KUALIFIKASI DELIK PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DENGAN DELIK SUAP DALAM KASUS KORUPSI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP) KOTA BANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG -UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kasus Posisi	76
1. Perkara Pidana dengan Nomor Registrasi Perkara 40/Pid.Sus/2017/PN.Bdg	76
2. Kronologis Kasus Pungli Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Bandung	78
3. Dakwaan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Bandung	82
4. Amar Putusan	90
B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Bandung	90
C. Hasil Wawancara	94

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN KUALIFIKASI DELIK PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DENGAN DELIK SUAP DALAM KASUS KORUPSI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP) KOTA BANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG -UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Penentuan Delik Pungutan Liar (PUNGLI) Dengan Delik Suap Di Dalam RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	96
B. Penentuan Delik Pungutan Liar (PUNGLI) dengan Delik Suap yang Dilakukan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.....	104
C. Rumusan Delik yang Tepat dalam Kasus-Kasus Pelayanan Publik	112

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	117
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA	ix
LAMPIRAN	xvi